

PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN PASURUAN DI ERA NEW NORMAL DALAM PRESPEKTIF CROSS SECTORAL COLLABORATION

Muhammad Zaini
DPRD Kota Pasuruan
email: m.zaini1530@gmail.com

Abstract

Dimasa New Era Normal merupakan masa tantangan bagi banyak sektor terutama dibidang pariwisata dipasuruan sebagaimana Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang miliki objek wisata baik wisata religi, wisata alam ataupun wisata huburan, dengan tingginya angka pengunjung Wisman pada Maret 2020 turun sebesar 71,83% dibandingkan jumlah wisman periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 20.497 kunjungan. Maka sekarang memiliki permasalahan setelah merebaknya wabah korona dengan menurunnya perekonomian sebab berimbas pada bidang ketenagakerjaan dari sektor pariwisata dengan dirumahkanny sebanyak 1.821 pekerja pada sekto pariwisata. Fakta tersebut menyumbang beban atas meningkatnya angka kemiskinan dipasuruan, dengan berimplikasi pada perekonomian masyarakat ditingkat bawah dimana terjadi panic buiyng sebab kenaikan harga bahan pokok ditengah PHK masal. Namun sejak awal bulan juni, telah dibukanya New Normal dan akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan upaya pengembangan sektor pariwisata yang memiliki konsekuensi atas peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meskipun masalah yang dihadapi sektor pariwisata dalam kebijakan ketengakerjaan di era New Normal memiliki banyak tantangan oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama Cross Sectoral Collaboration dalam mengembangkan pariwisata dan mampu meingkatkan taraf perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan.

Keywords: *Pariwisata, Ketenagakerjaan and Collaboration*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan dari kondisi ke kondisi yang lebih baik, sebagaimana usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa (Siagian, 2005:21). Proses pelaksanaan pembangunan bisa dari bermacam-macam aspek social, adapun salah satunya adalah sektor pariwisata, sektor pariwisata dapat menambah pemasukan devisa yang besar bagi pemerintah dalam rangka menunjang berhasilnya pembangunan nasional, didalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai penghasil devisa dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa.

Potensi pariwisata dikabupaten Pasuruan memiliki penunjang lengkap letak geografis yang sangat strategis berada pada jalur *Segitiga Emas* pengembangan Jawa Timur yaitu antara Malang, Surabaya dan

Jember juga berada pada jalur utama Surabaya-Bali apabila melalui jalur darat. Potensi kepariwisataan yang dimiliki kabupaten pasuruan merupakan sektor yang cukup strategis di dalam perekonomian nasional dan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan pemerintah daerah.

Pariwisata memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung (Bahar dan Marpaung, 2002) dari aktifitas perekonomian disektor pariwisata memiliki dampak pada *sector home industri* baik UMKM skala kecil dan skala besar. Bertumbuhnya sektor pariwisata yang berimplikasi pada berkembangnya sektor UMKM maka memiliki pengaruh secara tidak langsung pada sektor ketenaga kerjaan, dimana sektor UMKM cukup tinggi dalam membuka lapangan pekerjaan.

Pembangunan dan pengembangan kawasan Pariwisata akan berdampak positif secara ekonomis sebagaimana tujuan pariwisata maju dan berkembang dapat bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar (Santoso dkk, 2017). Namun di era pasca pandemi dengan ditandainya Era New Normal, pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata di kabupaten Kabupaten Pasuruan pada umumnya dapat menjadi ancaman pada sisi kesehatan bila mana pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata tidak dibarengi dengan

kesiapan wilayah setempat, khususnya sumber daya manusianya dan infrastruktur. Meskipun kebijakan pariwisata Pasuruan mulai dikembangkan dengan berbagai potensi yang ada dipemerintah Kabupaten Pasuruan yang didukung oleh Agribisnis, Agrowisata dan Pariwisata yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Pasuruan. Maka akan berdampak pada keselamatan masyarakat secara umum sebagaimana kasus positif corona Kabupaten Pasuruan 42 orang, jumlah PDP 108 dan ODP 247 (data 7 Juni 2020) dengan asumsi masih dalam program *Physical Distancing* dan *Social Distancing* masih bertambahnya kasus positif tersebut.

Sebagaimana kebijakan pengembang pariwisata memiliki *multi player effect* terhadap ketenagakerjaan maka dalam menjaga stabilitas disektor pariwisata dibutuhkan pelibatan berbagai pihak, baik Pemerintah maupun Swasta. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten pasuruan harus mampu mengupayakan secara baik untuk mengembangkan potensi pariwisata yang terpadu dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana secara mendalam di era New Normal.

PEMBAHASAN

Potensial pariwisata di kabupaten Pasuruan harus dikembangkan baik sarana dan prasarana, sebab menyangkut Obyek

wisata ini akan menjadi pusat daya tarik dan kepuasan bagi wisatawan (Widya, 2001) maka sarana itu menjadi hal terpenting dalam pengembangan pariwisata sebab bergerak disektor jasa, yang mana berkaitan betul dengan wisata atau wisatawan (Sammeng, 2001:1). Pemerintah daerah pasuruan memiliki komitmen dalam mengembangkan pariwisata dengan tujuan untuk mempercepat proses peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat. Banyaknya keuntungan jika pariwisata dapat menjadi salah satu hal bahwa pemerintah wajib mempunyai kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengembangan kawasan pariwisata di era New Normal. Menurut Yoeti (2008:20) dampak dari akibat pengembangan pariwisata sebagai suatu industri adalah dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan adanya wisatawan, perlu pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (need), keinginan (want) dan harapan (expectation) wisatawan.

Dalam pengelolaan pariwisata yang baik, maka diperlukan peran Pemerintah sebagai fungsi regulatori (Wibawa, 2005) artinya bahwa ketika negara (pemerintah daerah) semakin aktif melakukan fungsi arbitasi dan regulasi dengan aktif menerapkan kekuasaan sebagai penegak hukum dalam arti luas dalam menyelesaikan konflik ditengah new normal dalam pengembangan industrialisasi, maka bisa

memberikan effect positif dalam menjaga stabilitas ekonomi dari sektor pariwisata.

Pengelolaan Pariwisata ditengah pandemi corona dan kita dituntut untuk berdamai dengan virus tersebut, sebab berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga diperlukan sebuah tata kelola yang baik *good Management*. Pasuruan sebagai wilayah yang strategis atau segitiga emas dan tingkat pluralistic yang memiliki ciri disparitas antar wilayah, maka pendekatan dalam prespektif pemerintahan desentralistik maka mampu menjawab atas kepentingan dan kebutuhan tingkat daerah (Dwiyanto, 2006) menjelaskan atas pemerintah daerah memiliki ciri dan keunikan masing-masing yang tidak sama antar wilayah sehingga dalam system disentralisasi membagi urusan secara Politik, Administrasi dan Teknologi.

Easton (dalam Islamy, 2004:19), memberikan arti kebijakan negara sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi tersebut Easton dalam (Islamy, 2004:19) menegaskan hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sejalan dengan pernyataan tersebut, memilih atau tidak pemerintah dalam pengambilan keputusan memiliki eksistensi kebijakan kesejahteraan (Anderson 1975 dalam Winarno 2010,p.20). Proses kebijakan tidak hanya perilaku administratif dan

organisasional saja dimana oleh William N. Dunn (1984 dalam Samudra, 2009) proses kebijakan juga diwarnai oleh perilaku politik dengan bentuk program dan selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk program.

Sebagaimana upaya management pembangunan pariwisata dipengaruhi berbagai factor informal yakni sumber daya manusia, sebagaimana revolusi industri di Rusia menempatkan factor informal menjadi penting (Clarke, 1995,p.2); “.....*character of social relations in the production process in ‘socialist enterprises’, emphasising the importance of such factors as the identification of the individual with the collective, the elevation of the ‘cultural’ and educational level of the labour force, the reduction of absenteeism and labour turnover, or the constructive use of free as well as working time.*

Kebijakan pembangunan pariwisata yang dipengaruhi kuat atas factor informal (budaya, kepribadian, etos kerja), dan teknologi dalam pembangunan sektor pariwisata menjadikan problem sebagaimana upaya ditengah pembangunan sektor pariwisata didalam Era New Normal yang tidak hanya mengutamakan atas meningkatkan PDB Kabupaten Pasuruan melainkan juga hak kesejahteraan dasar keberlanjutan tenaga kerja dan kesehatan hak setiap warga (Alisen, 2015) maka menjadi kinerja pemerintah untuk menciptakan pasar

lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata dan sekaligus protection/ jaminan perlindungan bagi wisatawan.

Inovasi pemerintah menjadi tuntutan namun memiliki dampak atas keterbatasan sumber daya *resource* H. George Frederickson (1984) mendefinisikan Publik sebagai kepentingan yang berbeda namun dalam posisi yang sama dengan jumlah yang besar, sehingga menjadi satu dan dinamakan public. Mengingat besarnya kepentingan public, maka Pemerintah mengalami keterbatasan sumber daya sehingga diperlukan sebuah paradigm *collaboration* untuk mengatasi tuntutan dari public dengan kerjasama sebab ketidak mampuan Government dalam mengelola kepentingan public (Forer et.al, 2014).

Sebagaimana prinsip New Publik Management bahwa untuk mengutamakan pelayanan public maka perlu dibangun *interpreneurial government* (Osborn dan Gabler, 1992) dengan menempatkan pelayanan public ketenagakerjaan terfokus pada pengarah dalam pelayanan ketenagakerjaan, adanya control yang dimiliki masyarakat *based community self-help* sehingga peran pemerintah hanya mensupport kompetitifitas dalam pelayanan public untuk menciptakan kesejahteraan dari aspek pengembangan program sector pariwisata dan perlindungan bagi wisatawan terhadap virus Covid.

Kerjasama yang dibangun Pemerintah dengan pihak swasta/masyarakat bukan hanya sector infrastruktur namun juga bisa upaya penyediaan pelayanan public dibidang kesehatan. Dalam pelayanan tersebut terlihat akan adanya pelayanan independent (forrer, 2014,p.14) sebagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan secara mandiri dengan adanya kerjasama pengembangan sector pariwisata dan fasilitas perlindungan bagi wisatawan.

Kolaborasi lintas sektor adalah interaksi dari dua atau lebih dari tiga sektor organizational: sektor publik (unit pemerintah di semua tingkatan-lokal, negara bagian, dan nasional), untuk sektor swasta dan sektor swasta non-laba/non-profit. Kolaborasi dapat mencakup kombinasi dari tiga sektor, termasuk publik-swasta, publik-nirlaba, swasta nirlaba, atau publik-swasta-nirlaba. Ini adalah kolaborasi yang melibatkan lintas sektor untuk membuka lapangan pekerjaan dibidang jasa dan pelayanan kesehatan. *Collaborative governance* membedakan dirinya dengan partnership melalui peran pemerintah di dalamnya. Dalam partnership, pemerintah bekerja dengan membangun jejaring, koalisi, dan kemitraan yang bertujuan menciptakan pelayanan yang efektif dengan relasi *government to citizen*. Pada *collaborative governance*, pemerintah bekerja melalui sektor privat dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan

publik (O'Flynn dan Wanna dalam Erwan, 2015:137).

Dalam pengembangan kebijakan sector Pariwisata dikabupaten pasuruan, akan lebih efektif jika didekati melalui konseptual *Cross Sectoral Collaboration* (CSC) yang memiliki kesamaan yang diartikulasikan sebagai kolaborasi lintas sektor. Dalam analisis konseptual ini mencoba membangun definisi yang diberikan oleh Bryson, Crosby, dan Batu (2006 dalam Forer, 2014) bahwa Kolaborasi Lintas Sektor adalah menghubungkan secara sukarela dari berbagai aktor dalam upaya umum pengembangan sector pariwisata di era New Normal yang melibatkan berbagi informasi, sumber daya, kegiatan, kemampuan, risiko dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai sepakat untuk pengelolaan pariwisata di era New Normal, konseptual atas *Cross Sectoral Collaboration* dapat digambarkan tentang peranan dalam manajemen pariwisata sebagaimana berikut;



Organisasi yang terlibat dalam memproduksi atau mengelola Pariwisata di era New Normal, sebagian besar harus

dikendalikan oleh Sektor publik atau pemerintah daerah dalam bentuk regulasi yang jelas dan oprasionl, sebab dengan produk regulasi yang baik pula memudahkan dalam mengatur tanggung jawab dalam percepatan pengelolaan pariwisata di era New Normal.

Peranan pemerintah itu, jika terlalu kuat dalam pengelolaan sektor pariwisata maka muncul Ad Hock Collaborasi atau kesempatan yang sifatnya semi permanen atau proyek sementara atau darurat (Donahue dan Zeckhauser 2011). Namun jika ketentuan lebih pada pribadi private sektor maka bisa bersifat collaboration lintas sektor, dimana dalam pendekatan ini akan bisa memberikan model kerjasama yang sifatnya jangka panjang, sebab pedekatan *Cross Sectoral Collaboration* memiliki model dasar manajer publik dapat menggunakan masing-masing dengan karakteristik dasar, perbedaan, harapan, ketegangan, dan implikasi yang berasal dari potensi dan karekter masing-masing sektor. Jaringan melibatkan sektor publik dengan lebih dari satu aktor lainnya dari sektor swasta atau nirlaba. Banyak layanan yang akan diberikan dalam pengembangan sektor pariwisata yang memprogram dioperasikannya melalui jaringan yang mencakup berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Jaringan adalah konfigurasi baru dan ingin mengetahui tata kelola bagi kebanyakan

manajer umum dan diatur dalam berbagai bentuk aktor.

Model Collaboration ini, adalah penjelasan tentang cara berkollaborasi, bentuk bergeser bisa kekanan atau kekiri, namun tahapan dalam melakukan pengembangan *Cross Sectoral Collaboration* (CSC) sebagaimana gambar dibawah;



Dalam upaya kerjasama disektor Pariwisata, memiliki kunci yakni Integrasi, sebagaimana dalam sektor pariwisata dimasa Era New Normal maka bisa dilakukan dalam tahapan integrasi lintas sektor sebagaimana berikut;

- 1) **Ketentuan Pemerintah Langsung.** Pemerintah langsung memberikan pelayanan kesehatan khusus Pasien terpapar Virus Covid disaat memasuki wilayah Pariwisata yang ditemukan melalui digital Infrared saat melalui berbagai program pengukuran suhu pada saat masuk pariwisata di kabupaten pasuruan. Jika terdapat orang yang terinfeksi virus, maka Petugas Pariwisata langsung mengantarkan orang tersebut ke fasilitas puskesmas yang ditunjuk berdasarkan kewilayahan, dalam hal ini bisa menuju puskesmas setempat. Pasien yang terpapar corona dalam pengobatan (jika telah ditemukan Vaksin) didanai dengan Anggaran

Pemerintah Daerah dan dikelola oleh pegawai publik dengan bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, guna menopang kegiatan tersebut, maka berlaku pengelolaan anggaran *Manny Follow Fungtion* sebagai dasar Democratic Bugeting yang memprioritaskan atas Necessary Fuction of Government (Jhon Stuart Mill *dalam* Sumarsono 2010) yang memberlakukan pajak lebih pada fasilitas pariwisata.

- 2) **Mengontrakkan.** Pemerintah telah menetapkan bahwa penanganan pasien terpapar virus corona menjadi tanggung jawab pemerintah, juga melakukan kontrak dengan instansi yang bergerak dibidang kesehatan untuk menangani korban terpapar virus, dalam pelayanan ini dikontrakkan untuk mengurangi biaya layanan yang terpusat pada puskesmas. Jika wisata yang jauh dari pusat kesehatan, maka pengelola pariwisata harus menyediakan secara mandiri, mengoperasikan dan mengelola secara mandiri. Dalam kasus ini, personil mungkin campuran pekerja sektor publik dan swasta.
- 3) **Kemitraan.** Kemitraan dalam Pariwisata yang bersifat umum bisa kemitraan pembuka lapangan pekerjaan, penggunaan dana CSR untuk fasilitas kesehatan, memberikan ketentuan bagi UMKM yang berada wilayah pariwisata guna melaksanakan standar protokol

kesehatan. Sektor swasta dalam penyampaian layanan ini bukan mempertahankan atau mengembangkan kapasitas masyarakat secara terpisah, namun nuntuk menyediakan layanan yang sama namun adanya kemitraan tersebut bisa berkaitan dengan pembiayaan dan juga fasilitas.

- 4) **Jaringan.** Jaringan dalam perawatan kesehatan yang umum merupakan sebuah ilustrasi dari konsorsium organisasi publik, swasta, dan nirlaba yang dirancang untuk membantu masyarakat setempat dalam desain dan pendanaan dari Penanggulangan korban virus. Jaringan memungkinkan menggabungkan keahlian dari sejumlah sumber dan berbagai sektor untuk membawa untuk menanggung pada masalah yang dihadapi.
- 5) **Muncul dalam menanggapi (*responsive*).** kebutuhan perawatan kesehatan pasien Covid 19, yang tidak dipenuhi atau tidak tercover oleh program-program pemerintah sebab lonjakan penyebaran dan sebab kewilayahan, maka pemilik Pariwisata bisa membantu dalam program Penanggulangan jika dalam masa New Normal terdapat lonjakan, sistem ini program yang didanai dan dioperasikan oleh konsorsium organisasi swasta dan nirlaba untuk melawan pasien terpapar Covid 19 yang tidak menerima banyak

attention dari program pemerintah sebab jangkauan jauh.

Pariwisata di kabupaten pasuruan di era New Normal sangat berpotensi. Ada keuntungan dan kerugian dengan masing-masing metode kolaborasi. Misalnya, pemerintah memiliki kontrol penuh ketika mendefinisikan, menghasilkan, dan provides kepentingan publik atau pelayanan (penyediaan public). Ketika kita bergerak ke kanan pada kontinum, ada kontrol pemerintah kurang sebagai aktor-aktor lain terlibat. Pada ekstrim kanan adalah privatisasi atau ketentuan swasta, di mana pemerintah benar-benar dihapus dari persamaan penyediaan dan hanya secara tidak langsung kontrol, jika sama sekali, melalui proses regulasi dan perpajakan. Dalam memberikan kendali, *government* mungkin mencapai tujuan penting lainnya, termasuk efisiensi yang lebih besar, lebih banyak inovasi, layanan yang ditargetkan lebih besar, dan pertumbuhan sektor swasta. Ketika kita bergerak ke kanan, pemerintah juga harus beroperasi dalam lingkungan kolaboratif yang lebih besar, dan intensitas kerjasama cenderung meningkat. Dengan demikian, seperti dengan banyak pilihan lain, manajer publik mungkin harus memutuskan yang terbaik dalam Pengembangan Pariwisata di New Normal.

PENUTUP

Kesimpulan

Pariwisata menjadi salah satu penopang perekonomian di kabupaten pasuruan, setelah kasus Covid-19 dan berlakunya Physical Distancing dan Social Distancing dan bahkan sudah banyak daerah yang melakukan PSBB maka berdampak terhadap pariwisata hingga terdapat PHK pada pekerja di sektor Pariwisata, dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Namun, dibulan Juni telah dilonggarkan PSBB maka mulai bergeliat simpul perekonomian, akan tetapi perlu diantisipasi terhadap persoalan New Normal yang mengasumsikan kita berdamai terhadap Covid-19. Maka perlu kebijakan pemerintah dalam persiapan Pariwisata yang bisa mendongkrak perekonomian ditengah wabah Covid 19, oleh sebab itu diperlukan pendekatan Cross Sectoral Collaboration sebagai bentuk kolaborasi dalam mengelola pariwisata yang tanggap terhadap Covid-19. Sebagaimana fasilitas yang mengikuti standar kesehatan dan juga fasilitas kesehatan.

Dengan pengamanan dan fasilitas yang sesuai dengan Standar Kesehatan maka, barang tentunya pengembangan Wisatawan di kabupaten Pasuruan tidak terhambat, dan berdampak luasnya lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata, serta adanya pariwisata baik religi, wisata alam dan ataupun hiburan sudah memiliki kesiapan pelayanan kesehatan jika ditemukan pengunjung yang terpapar Corona-19.

Rekomendasi

Pemerintah dalam pengembangan Sektor pariwisata dalam New Normal, maka diharuskan untuk melakukan Cross Sektoral Collaborasi dengan aktor yang lain, baik Private aktors, Non Private Aktors. Dalam Collaborasinya pemerintah sebatas membuat aturan dalam kesiap tanggapan dalam menghadapi New Normal dengan menerapkan fasilitas dan layanan diwilayah pariwisata sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga mendorong/fasilitator atas kemitraan dengan pihak Perusahaan dalam penggunaan dana CSR dalam pelayanan tanggap Darurat dalam era New Normal.

REFERENSI

- (1). Siagian, Sondang P. (2005). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- (2). Bahar, H. dan Marpaung, H. (2002) *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta. (3).
- (3). Santosa, Eren Dea Ajeng Inggil, Choirul Shaleh dan Minto Hadi (2017) *Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal (Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 1, Hal. 89-95
- (4). Widya, Karisma (2001). *Analisis Peran Industri Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo*. Universitas Brawijaya.
- (5). Sammeng, Andi Mappi. (2001) *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta, Balai Pustaka. (6). Yoeti, Oka. (2008). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung, Angkasa.
- (7). Wibawa, Samdora. 2005. *Reformasi Administrasi*. Yogyakarta. Gava Media
- (8). Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- (9). Islamy, Irfan M, (2008). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* Jakarta: PT. Bina Aksara
- (10). Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta. Media Presindo
- (11). Aleson, Marisa Ramirez and Jorge Fleta-Asin (2015), *Is The Importance of Location Factors Fifferent Depending on The Degree of Development of Country*. Jurnal of International Management Fox School of Business, 27 October 2015.
- (12). Forrer, Jhon J, Jamaes Edwine Kee, Eric Boyer. (2014) *Governing Cross-Sectoral Collaboration*. USA, Jossey Bass.
- (13). Fredericson, G.F (1984). *Publik Administrasi Primary*.
- (14). Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government : How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service*, terjemahan : Mewirusahaakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- (15). Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- (16). Donahue, John D. and Richard J. Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*. Princeton: Princeton University Press
- (17). Sumarsono, Sonny (2010) *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu Jogjakarta.